

# KONFLIK SOSIAL DI ACEH

(Akar Permasalahan dan Solusinya)

Oleh : Drs. Husaini, M.A.\*

## I. Pendahuluan

Konflik yang terjadi di Indonesia dari dulu hingga awal Abad 21 sekarang ini menunjukkan betapa lemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik sosial yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal telah banyak memakan korban anak bangsa, dan apabila tidak ditangani secara arif, akan terus menimbulkan korban yang lebih besar lagi. Lihat saja contoh konflik yang paling dominan yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) seperti yang terjadi di Ambon (Maluku), Poso (Sulawesi Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), dan beberapa daerah lainnya di Indonesia telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di sana. Lebih ekstrim secara vertikal dan konflik yang melibatkan antara daerah dengan pusat seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi

Papua Merdeka (OPM) yang menuntut pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari kasus-kasus yang telah disebutkan, terdapat fakta sejarah yang perlu dipertanyakan mengapa persoalan itu terjadi, apakah proses pembinaan bangsa belum sempurna atau ada hal-hal lain yang belum terungkap?

Dalam sejarah, Aceh dikenal sebagai salah satu daerah yang paling sering dilanda konflik. Konflik yang terjadi bukan hanya sekarang, tetapi sejak pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Aceh, masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan, dan hingga kini konflik masih saja berlangsung. Seolah-olah konflik itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh.

Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, masyarakat Aceh hampir sepanjang perjalanan sejarahnya

\* Staf Pengajar dan Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.

telah menjadi korban dari konflik politik. Ini terjadi bukan saja akibat sistem politik otoriter dalam skala nasional selama ini, tetapi juga masih adanya sudut pandang politik yang tidak sama antar-masyarakat Aceh. (Moeklas, 2000: 2).

## II. Konflik dalam Lintasan Sejarah Aceh

Dalam sejarah bahwa sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat Aceh berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah dari tangan Belanda. Walaupun Belanda pernah menaklukkan Aceh, namun Belanda tidak pernah merasa aman karena rakyat Aceh tidak pernah tunduk kepada Belanda. Perang Belanda di Aceh yang dimulai sejak 1873 merupakan perang yang paling berat dan lama, dalam catatan orang Ibrahim Alfian (1987) menjelaskan bahwa perang ini baru berakhir pada tahun 1912 setelah ini baru berdiri suatu pemerintah jajahan Hindia Belanda di Aceh.

Setelah berkuasa di Aceh, untuk memperkuat posisinya maka mulailah merangkul *uleebalang-uleebalang* (bangsawan) yang sebelumnya sudah memiliki kedudukan di Aceh, sebagai bawahan sultan yang berkuasa di daerahnya. Melalui *politik divide et empera* (politik pecah belah) yang dijalan-

kan Belanda, akhirnya mampu mempengaruhi para *uleebalang* untuk tidak lagi tunduk di bawah sultan dan memposisikan dirinya sebagai 'raja-raja kecil' yang absolut. Kondisi ini juga dimanfaatkan Belanda untuk menanamkan bibit permusuhan antara *uleebalang* dan ulama yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi perpecahandi antara kedua kelompok ini. Padahal sebelumnya kedua kelompok ini merupakan mitra utama dalam memerangi musuh bersama yakni Belanda (Moeklas, 2000: 3). Perseteruan ini berlanjut hingga Jepang masuk ke Aceh pada tahun 1942. Pada masa itu ulama dan rakyat dirangkul oleh Jepang dan selanjutnya kelompok ini secara bersama-sama melawan Belanda, dan konflik antara ulama dan *uleebalang* semakin tajam.

Sebagai klimaks dari konflik antara ulama dan *uleebalang* adalah setelah Indonesia Merdeka. Pertentangan antara ulama dan *uleebalang* ini dikenal sebagai Perang *Cumbok* atau Revolusi Sosial yang berakibat runtuhnya kekuasaan feodal di Aceh serta memakan korban harta dan nyawa rakyat cukup besar. Sebagai eksese dari peristiwa ini, tidak hanya meninggalkan luka yang mendalam di kalangan masyarakat Aceh,

tetapi lebih jauh telah tertanam rasa "*ineng balad*" (menuntut balas) di kalangan kelompok tertentu yang merasakan dirugikan. Hal ini bisa terjadi karena penyelesaian konflik ini dianggap tidak adil dan merugikan pihak *uleebalang*. El Ibrahimy (1978) menyebutkan Perang *Cumbok* juga merupakan salah satu faktor timbulnya pemberontakan DI/TII di Aceh tahun 1953.

Munculnya peristiwa DI/TII (pemberontakan Daud Beureuh) tahun 1953 di Aceh merupakan babak baru konflik di Aceh. Kalau Perang *Cumbok* merupakan konflik intern yang terjadi secara horizontal antara kelompok elite ulama dan *uleebalang* di Aceh, maka peristiwa DI/TII adalah konflik vertikal yang terjadi antara daerah (Aceh) sebagai bagian dari Republik Indonesia dengan pemerintah pusat). Banyak hal yang melatarbelakangi terjadi peristiwa ini. Di antara para ahli masih berbeda pandangan dalam menilai peristiwa ini. Yang jelas bahwa peristiwa ini terjadi karena kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. El Ibrahimy (1978) menyebutkan bahwa cukup banyak hal yang menimbulkan kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat, di antaranya adalah tidak adanya penghargaan terhadap jasa-jasa orang Aceh yang

telah banyak disumbangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan dan sumbangan orang Aceh yang telah banyak disumbangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan dan sumbangan orang Aceh bukan hanya pada masa penjajahan Belanda, namun setelah Indonesia merdeka terus berlanjut. Ketika Agresi Belanda berhasil memporandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1947-1949, kecuali Aceh tetap tidak tersentuh dan tampil mempertahankan NKRI. Seluruh pejuang Aceh ketika itu berjuang di perbatasan Aceh Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Front Medan Area. Alasan lain Daud Beureueh memberontak karena ingin menerapkan syariat Islam di seluruh Aceh. Oleh karena itu, begitu munculnya gagasan negara Islam Indonesia di Jawa Barat dengan ideologi Islam sebagai dasar negara di bawah pipinan Kartosuwirjo, secara spontan Aceh mendukungnya. Tuntutan penerapan syariat Islam di Aceh juga tidak terlepas dari janji-janji yang pernah diucapkan oleh Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Aceh, di mana dalam suatu dialognya dengan Daud Beureueh yang menjanjikan akan memberikan hak mengurus diri sendiri sesuai

dengan ajaran Islam kepada rakyat Aceh, apabila perang Belanda telah selesai. (El Ibrahimy, 1687 : 68).

Kemudian apa yang pernah diucapkan Soekarno ternyata dikhiainati, bahkan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1950, Aceh ditetapkan dengan status keresidenan sebagai bagian dari provinsi Sumatera Utara. Akhirnya peristiwa pemberontakan DI/TII ini membuat rakyat Aceh menjadi korban, dan menambah catatan sejarah konflik di Aceh.

Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah pusat menempuh berbagai pendekatan. Melalui dialog dan pendekatan yang intensif, akhirnya dicapai suatu kesepakatan Aceh berubah dari keresidenan menjadi provinsi, kemudian melalui SK Wakil PM No. 1/Missi/1959, dikukuhkan menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan otonomi daerah tersendiri dalam bidang agama, pendidikan, dan peradatan. (Hardi, 1993).

Selama Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, penyelenggaraan pemerintah daerah di Aceh sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Status Istimewa yang pernah diberikan kepada Aceh hanya tinggal nama saja. Pemberlakuan UU No. 5 tahun 1947 yang menyeragamkan bentuk

administrasi pemerintah daerah dan desa merupakan satu upaya yang jelas menyudutkan sistem administrasi pemerintah adat yang telah berlaku berabad-abad di Aceh. Sebagaimana diketahui, sebelum Aceh diperangi dan diduduki oleh Belanda, hukum dan adat berjalan dengan baik. *Uleebalang* mengendalikan adat di negerinya masing-masing dengan bantuan para ulama. Adat bergandengan dengan hukum Islam. Setelah Aceh diduduki Belanda, hukum dan adat menjadi porak-poranda. (Husin, 1970).

Pelaksanaan UU No. 5 tahun 1947, dengan sistem politik Orde Baru yang sentralistik, eksploitasi kekayaan alam Aceh tanpa batas, kesenjangan dan ketidakadilan, distribusi sumber-sumber dan pembangunan yang tidak merata merupakan sebab-sebab yang melahirkan rangkaian pergolakan politik di Aceh. (Alfina, 1998 : 8). Munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 4 Desember 1976 pada intinya adalah sebagai klimaks perbedaan pandangan politik intern masyarakat Aceh (elit politik daerah) dalam menyikapi politik pemerintah pusat. (Moeklas, 2000 : 9).

Mengatasi situasi konflik di Aceh yang mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat dan demi menjaga kepentingan

politik dan ekonomi pusat, pemerintah menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang dimulai tahun 1989-1998. Walaupun operasi ini berhasil dijalankan, namun rakyat juga turut menjadi korban.

Setelah adanya tuntutan dari berbagai pihak akhirnya DOM dicabut. Pencabutan DOM ini dilakukan pemerintah pusat setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Salah satu hal yang meyakinkan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto memutuskan mencabut status DOM Aceh adalah semangat perjuangan pengorbanan, dan kesetiaan Aceh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alfian 1998 : 11). Keinginan pemerintah mencabut Status DOM ini adalah upaya mengalihkan pendekatan keamanan dari cara-cara militer ke cara pendekatan kesejahteraan yang lebih manusiawi. Pencabutan status DOM ini diikuti dengan penarikan pasukan militer non organik mulai hari Kamis 20 Agustus 1998.

Walaupun status DOM telah dicabut di Aceh, Presiden dan Menhankam/Pangab sudah meminta maaf, akan dilakukan pencarian fakta pelanggaran HAM, memberikan ganti rugi dan rehabilitasi para korban serta berbagai janji pemerintah lainnya, namun

dianggap belum memadai dan kurang dipercayai oleh rakyat Aceh. Trauma dan penderitaan yang cukup lama diderita oleh orang Aceh akibat warisan yang ditinggalkan oleh kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat menimbulkan rasa *tueng bila* kembali di kalangan orang Aceh yang tertindas yang pada gilirannya GAM bangkit kembali dengan kekuatan yang cukup besar.

Sebagai akibat bangkitnya kembali kekuatan GAM di Aceh dan maraknya tuntutan dari berbagai kalangan seperti Gerakan Mahasiswa/Taliban, LSM termasuk SIRA (Sentral Informasi Rakyat Aceh) dan lain-lain di era reformasi membuat suasana semakin parah, berbagai anarkis muncul di mana-mana, hukum tidak berjalan, roda pemerintahan lumpuh, kriminalitas merajalela, penculikan, pembunuhan, perampokan, pembantaian, pembakaran rumah, toko, gedung-gedung perkantoran dan sekolah-sekolah menjadi pemandangan tersendiri dalam kehidupan Rakyat Aceh.

Kondisi seperti ini digambarkan di atas yang berlangsung di Aceh seakan-akan dibiarkan begitu saja, Aceh seperti tanah tak bertuan, kondisi keamanan benar-benar terganggu, rakyat dihantui rasa ketakutan, mengungsi dan eksodus

sudah biasa, korban terus berjatuhan.

Mencermati kondisi seperti ini, penyelenggaraan Pemilu 1999 diharapkan bisa memberikan solusi bagi penyelesaian konflik Aceh ternyata hal itu belum bisa menyelesaikan persoalan, malah tuntutan demi tuntutan terus meningkat mulai dari otonomi khusus, negara bagian, referendum sampai merdeka. Hal-hal seperti ini menambahkan ketegangan antar kelompok yang saling bertikai di Aceh. Kemudian pemberitaan otonomi luas melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan penempatan kembali Aceh sebagai Daerah Istimewa yang diperluas melalui UU No. 44 Tahun 1999 serta adanya TAP MPR yang menetapkan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus ternyata belum mampu menyatukan visi politik di Aceh (Moeklas, 2000 : 10). Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 yang menetapkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengakhiri konflik di Aceh. Di samping adanya undang-undang yang telah ditetapkan, masih saja ditempuh jalur-jalur diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Undang-

undang yang sudah ditetapkan ternyata kurang mendapat respon dari pihak GAM, mereka tetap pada tuntutan mereka "Aceh Merdeka" ini bisa dipahami karena pemerintah pusat Republik Indonesia lamban dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Aceh.

Masa Jeda Kemanusiaan di Aceh merupakan episode baru penyelesaian konflik Aceh. Masa ini menimbulkan harapan rakyat Aceh akan menempuh kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Melalui dialog yang intensif antara GAM dan pemerintahan Republik Indonesia sepakat bahwa konflik Aceh akan diselesaikan secara bermartabat, mengedepankan kesadaran manusia yang berbasis moral Islam yang menguntungkan kedua belah pihak. Intinya adalah berdialog secara damai meninggalkan cara-cara kekerasan.

Dalam dialog damai masa jeda kemanusiaan di Aceh banyak pihak yang menaruh harapan besar akan keberhasilannya, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang ikut membantu kehadiran HDC (*Hunry Dunant Centre*) sebagai fasilitator asing misalnya menunjukkan adanya kepedulian terhadap konflik Aceh ini. Namun sangat disayangkan kesepakatan dan kesepahaman bersama yang telah dirintis dengan susah payah dan pengorbanan yang

besar akhirnya sirna. Banyak alasan perundingan dan dialog ini gagal. Masing-masing pihak bersikeras pada tuntutananya, kedua belah pihak tidak mau mengalah mempertahankan prinsipnya.

Tidak terlepas dari kepentingan kelompok tertentu yang menginginkan dialog ini gagal, berbagai pelanggaran atas Kesepahaman Jeda Kemanusiaan tetap terjadi.

Perkembangan berikutnya ternyata Jeda Kemanusiaan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, setelah gagal dalam perundingan ditambah lagi situasi yang tidak menguntungkan di Indonesia (konflik antar-partai politik di pusat), dan setelah melalui proses perkembangan dan evaluasi yang matang Jeda Kemanusiaan dihentikan. Selang beberapa waktu masa Presiden Megawati, Aceh ditetapkan sebagai daerah yang berstatus Darurat Militer.

Penetapan Aceh sebagai daerah darurat militer tertuang dalam Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003, yang ditandatangani hari Senin 18 Mei 2003. Dalam keputusan itu disebutkan darurat militer di Aceh berlaku untuk jangka waktu enam bulan, kecuali diperpanjang melalui Keppres tersendiri.

Awal penetapan darurat militer di Aceh disahuti oleh masyarakat dengan perasaan takut dan terancam. Suasana di Aceh semakin panas, anarki dan kekacauan terulang kembali. Akan tetapi setelah berjalan sekitar dua bulan kondisi di Aceh berubah ke arah yang lebih kondusif. Mungkin karena itu pula status darurat militer di Aceh diperpanjang untuk enam bulan lagi.

Konflik sosial di Nanggroe Aceh Darussalam telah lahir sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka. Berbagai faktor penyebab dan latar belakang terjadinya konflik di Aceh telah diuraikan dalam halaman-halaman sebelumnya.

Sering terjadi konflik di Aceh menandakan bahwa ada hal-hal yang keliru yang dilakukan dalam proses pembinaan masyarakat Aceh sebagai bagian dari bangsa Indonesia, penanganan konflik Aceh yang tidak profesional menyebabkan rakyat menderita sehingga kepercayaan terhadap pemerintah berkurang.

Oleh karena konflik di Aceh bukan hanya konflik vertikal saja (daerah dan pusat), tetapi juga konflik horizontal (sesama elit politik) dan juga masyarakat sehingga penyelesaian konflik sulit ditemukan. Namun ada hal-hal yang bisa dilakukan sebagai solusinya.

Bercermin pada peristiwa sejarah yang telah terjadi bahwa bukanlah persoalan harta kekayaan yang menyebabkan konflik di Aceh, tetapi disebabkan oleh faktor dan motif-motif yang tersembunyi dibaliknya. Untuk itu kiranya perlu menjadi pengalaman bagi pemerintah dan semua pihak dalam usaha penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh dewasa ini.

Patut dihargai usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini, misalnya melalui pembagian keuangan antara pusat dan daerah, memberi otonomi khusus, mengesahkan undang-undang NAD dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu disadari bahwa semua ini terjadi setelah gencarnya tuntutan dan desakan dari berbagai unsur masyarakat Aceh.

Solusi terbaik adalah memberikan apa yang diinginkan oleh

masyarakat Aceh. Kembalikan harkat dan martabat mereka pada posisi yang wajar dan terhormat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah melekat dalam setiap kehidupannya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan menerapkan tradisi politik kesejahteraan sebagaimana dikatakan Chairul Ichsani (2000) menerapkan salah satu solusi yang tepat. Kemudian menanamkan kesadaran sejarah bagi masyarakat Aceh terutama generasi muda adalah sangat penting, sebab kebanggaan masa lampau merupakan salah satu kekuatan dalam sejarah Aceh. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Semua hal ini bisa dilakukan bila keadaan benar-benar telah aman. Akankah konflik di Aceh segera berakhir?

Wallahualam bissawab.

## Daftar Pustaka

- Moeklas, Moersidin, *Konflik Politik, Sumber Bencana bagi Kehidupan Rakyat Aceh*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis ke-39 Universitas Syiahkuala, 30 Agustus 2000.
- Alfian, Ibrahim, *Dimensi Sosial Budaya dalam Pengembangan Masyarakat Aceh di Era Reformasi*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Budaya Aceh, di Banda Aceh, Tanggal 3-4 September 1998.
- \_\_\_\_\_, *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- El Ibrahimy, M. Nur, Tgk. M. Daud Beureueh., *Perannya dalam Penolakan di Aceh*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Hardi., *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Jakarta: Pt. Cipta Panen Serantai, 1993.
- Husin, Moehammad., *Adat Atje, Aceh*. Dinas P dan K Provinsi Daerah Istimewa Banda Aceh, 1970.



Walsh, W.H., *Philosophy of History : Introduction*. New York: Harper Torch Books, by Harper & Raw, 1967.

UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*.

Ichsan Chairul., *Ekonomi Kerakyatan: Tradisi Politik Kesejahteraan Masyarakat Aceh*, Makalah disampaikan pada Seminar Memperingati Dies Natalis ke-30 Universitas Syiahkuala Darussalam Banda Aceh 30 Agustus 2000.

